

**KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS ADANYA PAJAK  
HOTEL DAN PAJAK RUMAH MAKAN TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN POHuwATO**

**oleh:**

**PANDI PAKUTE  
E1119117**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS IHSAN  
GORONTALO  
GORONTALO 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS ADANYA PAJAK  
HOTEL DAN PAJAK RUMAH MAKAN TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**PANDI PAKUTE  
E1119117**

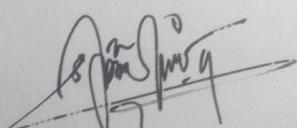
**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

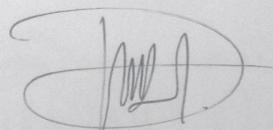
Gorontalo, 16 Juni 2022

**PEMBIMBING I**



**SULFIANTY, SE., M.Si**  
NIDN : 09 030984 03

**PEMBIMBING II**



**AGUS BAKU, SE., M.Si**  
NIDN : 09 010886 01

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS ADANYA PAJAK  
HOTEL DAN PAJAK RUMAH MAKAN TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN POHuwATO**

Oleh  
PANDI PAKUTE  
E1119117

**Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)**  
Universitas Ichsan Gorontalo

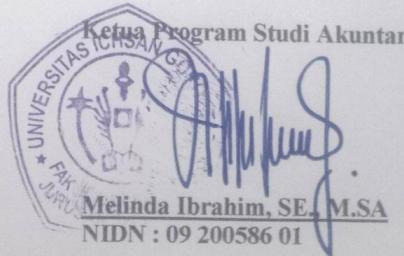
1. **Purnama Sari, SE., M.Si**  
(Ketua Penguji)
2. **Kartini Muslimin, SE., M.Ak**  
(Anggota Penguji)
3. **Taufik Udango, SE., M.Ak**  
(Anggota Penguji)
4. **Sulfianty, SE., M.Si**  
(Pembimbing Utama)
5. **Agus Baku, SE., M.Si**  
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Akuntansi



**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 24 juni 2022

Nomor..... Pernyataan



Pandi pakute

E1119117

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. Dengan nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul "**Kontribusi dan Efektivitas Adanya Pajak Hotel dan Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato**" penulisan skripsi penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sastra satu (S1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Kepada kedua orang tua yang tercinta, terima kasih atas cinta kasih dan pengorbanan ayah dan ibu yang tidak akan pernah dapat terbalas.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT)
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

4. Ibu Melinda Ibrahim, SE.,MSA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Sulfiandy, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan motivasi bagi penulis.
6. Bapak Taufik Udango, SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membagi ilmu pengetahuan yang pasti akan bermanfaat bagi saya.
8. Seluruh pegawai dan staf administrasi di universitas ichsan gorontali yang telah membantu saya dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi.
9. Seluruh teman-teman yang selalu ada memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, ..... 2022

Penulis

**ABSTRACT****PANDI PAKUTE. E1119117. THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX AND RESTAURANT TAX ON THE INCREASE OF REGIONAL REVENUE OF POHuwato REGENCY**

*Costs as a source of regional revenues are used to finance government expenditures, for example, spending for government organizations, building and repairing foundations, establishing schools and welfare offices, giving subsidies for the police, and financing government activities. This study aims to find out: (1) the effectiveness of the hotel tax and restaurant tax on the increase of regional revenue and (2) the contribution of hotel tax and restaurant tax to the increase of regional revenue. By involving 45 respondents, this study employs multiple regression analysis methods. The results of the first hypothesis indicate that the Contribution (X1) and Regional Revenue have a t count of  $0.940 > \text{sig. of } 0.048$ . It means that  $H_0$  is rejected. Though so,  $H_a$  is accepted or significant. The Effectiveness (X2) and Regional Revenue result in a t count of  $0.931 > \text{sig. of } 0.030$ . It means that  $H_0$  is rejected. However,  $H_a$  is accepted or significant.*

*Keywords: contribution, effectiveness, regional revenue*

## ABSTRAK

### **PANDI PAKUTE. E1119117. KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS ADANYA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RUMAH MAKAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POHuwato**

Biaya sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, misalnya. pembiayaan organisasi pemerintah, pembangunan dan perbaikan yayasan, pengaturan sekolah dan kantor kesejahteraan, subsidi untuk polisi, dan pembiayaan untuk kegiatan pemerintah. (1) Untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (2) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak rumah makan berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan responden sebanyak 45 responden, Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil hipotesis pertama Kontribusi (X1) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana t hitung  $0,940 > \text{sig.}$  sebesar 0,048 artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan. Efektivitas (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana t hitung  $0,931 > \text{sig.}$  sebesar 0,030 berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan.

Kata kunci: kontribusi, efektivitas, Pendapatan Asli Daerah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Pajak Daerah.....	7
2.1.1. Pengertian Pajak Daerah.....	7
2.1.2. Jenis – Jenis Pajak Daerah.....	7
2.1.3. Tarif Pajak Daerah .....	9
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.1.5. Kendala Pemungutan Pajak Daerah .....	11
2.2. Pajak Hotel .....	14
2.2.1. Pengertian Pajak Hotel .....	14
2.2.2. Objek Pajak Hotel .....	15
2.2.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	15
2.2.4. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hotel .....	15
2.2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.....	16
2.2.6. Sanksi Administrasi.....	20

2.3. Pajak Restoran/Rumah Makan .....	21
2.3.1. Pengertian Pajak Restoran .....	21
2.3.2. Objek Pajak Restoran .....	21
2.3.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	22
2.3.4. Tarif, Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Restoran .....	22
2.3.5. Masa Pajak dan Saat Terutang .....	22
2.4. Analisis Kontribusi dan Efektifitas.....	23
2.4.1. Analisis Kontribusi.....	23
2.4.2. Analisis Efektifitas .....	24
2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	25
2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	25
2.5.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.5.3. Kendala Peningkatan PAD .....	26
2.6. Penelitian Terdahulu .....	27
2.7. Kerangka Pikir.....	29
2.8. Hipotesis.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Obyek Penelitian.....	31
3.2. Metode Penentuan Sampel.....	31
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	32
3.4. Metode Analisis.....	33
3.4.1. Uji Hipotesis.....	33
3.4.1.1 Regresi Berganda .....	33
3.4.1.2 Uji t .....	34
3.4.1.3 Uji F .....	34
3.5. Operasionalisasi Variabel.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian .....	37
4.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif .....	38
4.2.1. Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel Kontribusi .....	39
4.2.2. Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel Efektivitas .....	42

4.2.3. Analisi Deskriptif Kuantitatif Variabel PAD .....	44
4.3. Pembahasan Analisis Regresi.....	46
4.4. Uji Validitas .....	47
4.5. Uji Reliabilitas.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>49</b>
5.1. Kesimpulan .....	49
5.2. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN .. ..	41

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item.....	39
Tabel 4.2	Tanggapan Responden Item 1 Kontribusi.....	39
Tabel 4.3	Tanggapan Responden Item 2 Kontribusi.....	40
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Item 3 Kontribusi.....	40
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Item 4 Kontribusi.....	41
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Item 5 Kontribusi.....	41
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Item 1 Efektivitas.....	42
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Item 2 Efektivitas.....	42
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Item 3 Efektivitas.....	43
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Item 4 Efektivitas.....	43
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Item 5 Efektivitas.....	44
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Item 1 Pendapatan Asli Daerah .....	44
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Item 2 Pendapatan Asli Daerah .....	45
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Item 3 Pendapatan Asli Daerah .....	45
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Item 4 Pendapatan Asli Daerah .....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	30
---------------------------------	----

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Jadwal Kegiatan.....	52
Lampiran 2 Abstract .....	53
Lampiran 3 abstrak .....	54
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian .....	55
Lampiran 3 Tabulasi Hasil kuesioner .....	58
Lampiran 4 Frekuensi Tabel .....	64
Lampiran 5 Hasil Output Regresi.....	68
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian .....	70
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian.....	71
Lampiran 8 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	42
Lampiran 9 Hasil Turnitin.....	73
Lampiran 10 <i>Curriculum Vitae</i> .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

*Pergantian keuangan daerah, khususnya provinsi, merupakan tahap awal dari pelaksanaan perbaikan, sehingga diharapkan daerah dapat lebih mengetahui potensi dan kebutuhan daerah. Peningkatan keuangan lokal adalah interaksi di mana pemerintah negara bagian dan semua lapisan masyarakat mengawasi berbagai aset yang ada dan membangun contoh asosiasi untuk membuat posisi baru dan menggerakkan tindakan keuangan di daerah.*

*(Keuangan, Bisnis dan Diponegoro, 2012)*

*Legislatif lingkungan diberi posisi yang luas untuk menangani rencana keuangan mereka sendiri dengan sedikit impedansi dari pemerintah pusat seperti yang diharapkan. Badan legislatif terdekat memiliki hak istimewa dan kemampuan yang luas untuk memanfaatkan aset keuangan dan keuangan teritorial mereka. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keharmonisan Keuangan Antara Fokal dan Legislatif Daerah. Namun kenyataannya, kontribusi pembayaran dan penggunaan unik provinsi terhadap pembayaran dan penggunaan lokal masih sedikit. Hingga saat ini, kekuatan kontribusi pemerintah pusat terhadap daerah masih sangat besar.*

*Untuk mengurangi kontribusi pemerintah pusat dan meningkatkan*

**PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ICHSAN  
GORONTALO  
GORONTALO 2022**

*kemajuan dan memperkuat kemandirian provinsi, otoritas publik harus meningkatkan pendapatan lingkungan. Sesuai Peraturan Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari: a) Hasil Belanja Daerah. b) Hasil pembalasan teritorial. c) Pendapatan dari organisasi lokal dan kekayaan teritorial terpisah para eksekutif dan. d) Penghasilan terdekat lainnya. Seberapa besar bagian pendapatan pajak provinsi dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis retribusi daerah dan pungutan daerah yang diterapkan dan diubah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang terkait dengan penerimaan kedua bagian tersebut. Untuk dapat mendukung dan mendorong wilayah tersebut, strategi membayar biaya oleh semua orang dapat dianggap sebagai salah satu peluang penting suatu tempat.*

*Ada perbedaan dalam berbagai penilaian terdekat dan biaya lokal/kota. Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Masuk Wilayah dan Kewajiban Impor, kabupaten umum memiliki 5 penyertaan biaya, khususnya: a) Bea Mesin Kendaraan, b) Biaya Gerak Kendaraan Mesin, c) Penilaian Bahan Bakar Kendaraan Mesin, d) Beban Air Permukaan dan e) Bea Rokok. Untuk sementara jenis pungutan yang dipungut oleh otoritas publik/daerah adalah 7 macam retribusi, yaitu: a) retribusi penginapan, b) retribusi makan, c) retribusi pengalihan, d) retribusi promosi, e) retribusi penerangan jalan , f) penilaian mineral bukan logam dan tugas batu, g) biaya taman, h) biaya air tanah, I) Biaya Rumah Walet, j) Penilaian Tanah dan Bangunan Negara dan Metropolitan, k) Biaya Perolehan Kebebasan Tanah dan Bangunan.*

*Biaya sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, misalnya. pembiayaan organisasi pemerintah, pembangunan dan perbaikan yayasan, pengaturan sekolah dan kantor kesejahteraan, subsidi untuk polisi, dan pembiayaan untuk kegiatan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang dapat' t dipenuhi oleh legislatif lingkungan. area pribadi sebagai barang dagangan terbuka. Melihat kekhasan tersebut, cenderung terlihat bahwa tugas merupakan hal yang vital bagi suatu daerah untuk membantu kemajuan daerah yang sebenarnya. Sebagai jenis pendapatan dengan potensi yang mengesankan, penilaian terdekat harus mendapatkan pertimbangan yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Hal ini terbantu dengan semakin meluasnya pemanfaatan administrasi yang diberikan oleh otoritas publik kepada rakyat dan rakyat, membuka pintu bagi otoritas publik untuk memperlancar berbagai penilaian di sekitarnya, terutama yang terkait dengan biaya penginapan dan biaya publikasi. Mempromosikan penilaian dan biaya penginapan seharusnya membuat kontribusi besar untuk berapa banyak pendapatan lokal yang dibuat setiap tahun.*

*Syarif (2016) dalam eksplorasinya menganalisis penyelidikan efektivitas dan kontribusi biaya penginapan, biaya rumah makan, bea pengumuman dan bea berhenti terhadap pendapatan lingkungan kota Tangerang tahun 2010-2014. Hasil review Tingkat kelayakan pemungutan biaya penginapan, biaya rumah makan, biaya iklan dan biaya pemberhentian di Kota Tangerang periode 2010-2014 secara normal termasuk aturan yang sangat layak (>100%), efektivitas biaya penginapan normal tingkat dalam lima tahun adalah 114,97%, biaya*

*restoran 124,50%, biaya pemberitahuan 116,89% dan biaya berhenti 125,28%. Sementara itu, kontribusi pendapatan biaya penginapan, biaya makan, bea iklan, dan biaya pemberhentian terhadap pendapatan asli Tangerang sangat kecil. Biaya penginapan normal, biaya makan, penilaian iklan, dan biaya berhenti berkontribusi hampir 5% untuk 2010-2014 PAD. Salah satu penyebabnya adalah pengakuan pendapatan bea provinsi lainnya yang meningkat secara keseluruhan dari tahun 2011 yang mempengaruhi besarnya biaya penginapan, biaya rumah makan, bea niaga, dan biaya pemberhentian. Peningkatan pendapatan kelurahan tersebut berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Masuk Bangunan (PBB).*

*Perbedaan antara pemeriksaan sebelumnya dan eksplorasi ini adalah pada jenis biaya terdekat yang dipertimbangkan dan area eksplorasi. Dengan asumsi biaya penginapan, biaya restoran, penilaian promosi dan biaya berhenti digunakan dalam penyelidikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan biaya penginapan dan biaya rumah makan/rumah makan, dengan mempertimbangkan bahwa biaya penginapan dan biaya restoran/rumah makan saling terkait. Sebagai daerah eksplorasi, pencipta memilih kota/ DPRD Pohuwato sebagai daerah ujian karena mereka melihat kekhasan pendapatan retribusi daerah yang biasanya mengalami peningkatan besar secara konsisten. Hal ini merupakan gambaran memadainya pelaksanaan pemerintah lingkungan dalam mengumpulkan tugas-tugas terdekat, terutama biaya penginapan dan biaya rumah makan. Peningkatan pendapatan biaya penginapan dan rumah makan tentu akan membuat kontribusi positif terhadap pendapatan lingkungan.*

*Mengingat hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengarahkan penelitian pada “**Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato**”. Hal ini untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pohuwato.*

### **1.2 Rumusan Masalah**

*Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:*

1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak rumah makan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Seberapa efektif pajak hotel dan pajak rumah makan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

*Tujuan penelitian ini tergantung pada latar belakang masalah dan topik, yaitu:*

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak rumah makan berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

*Penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk :*

1. Kontribusi praktisi

*Penelitian selanjutnya dipercaya dapat menambah informasi dan pemahaman tentang tarif penginapan dan tempat makan, sedangkan untuk instansi pemerintahan dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai semacam perspektif untuk rencana strategi dalam menempuh pilihan pendekatan ke depan.*

## 2. Kontribusi teoritis

*Diharapkan lebih banyak peneliti dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang pajak hotel dan restoran dan bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi informasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pohuwato.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Daerah**

##### **2.1.1 Definisi pajak daerah**

Sesuai dengan pengaturan keseluruhan Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Belanja Daerah dan Kewajiban Impor Provinsi, bea wilayah adalah bea masuk yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau unsur yang sah yang dipersyaratkan oleh peraturan, tanpa imbalan langsung dan dengan alasan penggunaan. berubah menjadi wilayah untuk keberhasilan terbaik individu. Biaya lingkungan tidak ditetapkan oleh legislatif lokal dengan peraturan daerah, kewenangan pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian terdekat, dan hasilnya digunakan untuk mendukung penggunaan pemerintah lingkungan dalam hal mengarahkan pemerintah dan pergantian peristiwa provinsi (Siahaan, 2013).

##### **2.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

*Pajak daerah dibagi menjadi dua menurut pembagian pemerintah daerah sesuai undang – undang nomor 28 tahun 2009, yaitu :*

1) Pajak Provinsi/pajak daerah tingkat I, terdiri dari:

- a. Sebuah Penilaian Kendaraan Mekanik, untuk tugas khusus dalam kepemilikan dan kontrol tambahan kendaraan mekanik.

**PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ICHSAN  
GORONTALO  
GORONTALO 2022**

- b. Perpindahan tanggung jawab atas kendaraan, khususnya tugas pada pertukaran tanggung jawab atas kendaraan karena adanya kesepahaman antara dua pertemuan atau kegiatan atau kondisi sepihak yang muncul dari perdagangan, tawar-menawar, hadiah, warisan, atau berlalunya kesepakatan yang sah.
- c. Pembebanan bahan bakar kendaraan mesin, khususnya tugas penggunaan bahan bakar kendaraan mesin.
- d. Muatan air permukaan, khususnya tugas pada ekstraksi atau potensi penggunaan air permukaan.
- e. Retribusi rokok, khususnya bea atas pungutan rokok yang dikenakan oleh otoritas publik.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota atau biasa disebut pajak daerah tingkat II
- a. Sebuah Biaya penginapan, menjadi penilaian khusus pada administrasi penginapan.
  - b. Eatery Expense, yang merupakan bea pada administrasi café.
  - c. Tugas Hiburan, khususnya Penilaian Diversi.
  - d. Biaya pemberitahuan, menjadi penilaian khusus pada organisasi pemberitahuan.
  - e. Biaya penerangan jalan, khususnya tugas atas pemanfaatan tenaga listrik, baik yang dibuat sendiri maupun dari sumber yang berbeda.
  - f. Membebankan biaya atas mineral dan batuan bukan logam, khususnya biaya untuk latihan pemisahan mineral bukan logam dan batuan, baik yang dimulai dari sumber reguler di dalam maupun di permukaan

dunia untuk digunakan.

- g. Asesmen Keberangkatan, yaitu tugas khusus pada pemberangkatan off-road, baik yang diberikan mengenai prinsip bisnis maupun sebagai bisnis, termasuk pengaturan tempat parkir untuk kendaraan bermotor.
- h. Muatan air tanah, khususnya yang bertugas pada pengambilan serta pemanfaatan air tanah.
- i. Penilaian rumah burung walet, khususnya biaya untuk latihan memindahkan atau kemungkinan bekerja di rumah burung walet.
- j. Beban Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Kota, khususnya beban darat atau bangunan yang berpotensi dimiliki, dikuasai serta dimanfaatkan oleh orang pribadi atau unsur yang sah, kecuali tanah yang digunakan untuk perkebunan, dinas jagawana, dan latihan pertambangan.
- k. Biaya pengadaan tanah dan kebebasan bangunan, khususnya membebani pengamanan tanah atau hak-hak yang berpotensi membangun.

### **2.1.3 Tarif Pajak Daerah**

*Tarif penilaian terdekat yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan No. 28 Tahun 2009 yang diatur dengan batasan tarif tertinggi alternatif untuk setiap jenis penilaian, yaitu:*

- 1) *Penilaian Kendaraan Terbesar 5%*
- 2) *Biaya pengambilan dan pengantaran kendaraan mekanis dengan batas 10%*

- 3) *Biaya bahan bakar kendaraan mesin paling besar 5%*
- 4) *Muatan air permukaan ditetapkan pada batas 20%.*
- 5) *Tarif rokok ditetapkan sebesar 10% (10%) dari tarif rokok.*
- 6) *Penginapan mengenakan biaya paling ekstrim 10%.*
- 7) *Biaya rumah makan paling ekstrim 10%.*
- 8) *Biaya hiburan paling ekstrim 35%.*
- 9) *Biaya publikasi adalah batas 25%.*
- 10) *Biaya penerangan jalan dibatasi 10%.*
- 11) *Biaya Mineral Bukan Logam dan Batuan dibatasi sebesar 25%.*
- 12) *Biaya penghentian adalah batas 30%.*
- 13) *Muatan air tanah ditetapkan pada batas 20%.*
- 14) *Biaya tunai rumah Swallow adalah batas 10%.*
- 15) *Biaya tanah dan bangunan provinsi dan metropolitan ditetapkan pada batas 0,3%.*
- 16) *Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.*

*Meskipun tingkat penilaian terbesar adalah tetap, ada berbagai pedoman di antara biaya negara bagian dan wilayah saat memutuskan tingkat pengeluaran menurut distrik. Saat ini pengaturan penilaian umum dalam undang-undang tidak resmi Nomor 65 Tahun 2001 tentang Bea Masuk Daerah menetapkan tarif pengeluaran yang paling penting, hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah yang menjalankan administrasi yang khawatir untuk mengelola dana masing-*

masing mengingat kemampuan dan keadaan kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

##### 1. Sistem Official Assessment

*Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Wajib Pajak hanya perlu melakukan pembayaran dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) di kantor pos atau bank persepsi setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.*

##### 2. Sistem Self Assessment

*Masyarakat menghitung, membayar, dan melaporkan pengeluaran terdekat yang harus dibayar. Catatan yang digunakan adalah formulir Penilaian Provinsi (SPTPD). SPTPD adalah struktur untuk mengerjakan, memastikan, membayar, dan merinci biaya yang terutang. Dalam hal Warga Negara tidak membayar atau tidak membayar, atau terdapat kesalahan hitung atau kesalahan tata bahasa dalam SPTPD, maka akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).*

#### **2.1.5 Kendala Pemungutan Pajak Daerah**

*Tugas pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola uang pembayaran pajak untuk melaksanakan dan mendanai tanggung jawab pemerintah sehingga pemerintah dapat memaksa warganya untuk*

*membayar pajak sebagaimana diatur oleh undang-undang, tetapi tidak mudah bagi pejabat pajak daerah untuk memungut pajak. diwajibkan oleh hukum. Konstitusi. Pejabat pajak daerah seringkali menemui halangan yang menghancurkan dalam mengumpulkan biaya lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Yasmin Lisasih (dalam Annisa, 2017), beberapa hambatan dalam mengumpulkan tugas-tugas terdekat adalah sebagai berikut:*

1. Pelaksanaan pengelolaan pedoman kewilayahan tugas daerah agak lemah.

Pengaturan Peraturan Nomor 34 Tahun 2000 mengatur bahwa pedoman wilayah tentang pungutan dan kewajiban impor yang ditetapkan oleh legislatif daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Pendeta Rumah Tangga dan Pendeta Uang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal deklarasi. Meskipun demikian, tidak semua daerah dan rezim/komunitas perkotaan menyerahkan pedoman wilayah kepada pemerintah pusat, masih banyak daerah dan aturan/wilayah perkotaan yang tidak mengikuti perintah dalam pengaturan undang-undang tersebut. Ketiadaan kesadaran pemerintah biasa dan otoritas publik/kota dalam memenuhi ketertiban hukum secara positif akan melemahkan berbagai tugas di sekitarnya, karena tanpa penyesuaian pedoman provinsi ini, dapat terjadi pedoman lingkungan yang kemudian menjadi berbahaya. mengingat kepentingan publik atau peraturan dan pedoman yang berpotensi lebih tinggi.

2. Sentralisasi kekuatan pemerintah pusat dalam mengatur pemilihan

pungutan lingkungan. Pergerakan setiap jenis organisasi negara di daerah sebenarnya membutuhkan kerangka manajemen pemerintahan pusat, namun pengawasan tersebut tidak boleh lagi membuka celah bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan sentralisasi kekuatan, yang nantinya dapat memicu perselisihan antara pusat dan daerah, atau antar wilayah dan antar wilayah/masyarakat perkotaan. kota, karena, seandainya yang Anda maksud adalah kemerdekaan, wilayah itu dikaburkan. Pengawasan pemerintah pusat yang terlalu ketat dapat melemahkan pemilihan biaya, karena manajemen pemerintah pusat yang terlalu ketat dapat membatasi kemampuan otoritas publik dan jaringan lingkungan, membuat legislatif di sekitarnya tidak mampu untuk mengawasi bagian dari kehidupan mereka dengan cara mereka sendiri. mengawasi hak-hak istimewa, perasaan kesetaraan dan budaya.

3. Daerah tidak mampu menyelesaikan sengketa pajak.
4. Sebagai aturan, pertanyaan muatan mengangkat masalah tentang bagaimana memutuskan jenis penilaian kota yang tepat untuk dikumpulkan (langsung atau implikasinya), dari siapa dan dari otoritas lingkungan mana (daerah atau kota). Debat biaya sebagai pertanyaan yang muncul di bidang penilaian pajak antara Warga Negara atau Penjamin Tugas dan otoritas biaya yang dilengkapi karena penerbitan pilihan yang dapat ditantang atau klaim di bawah tatapan tetap pengadilan tugas dalam pandangan penilaian peraturan dan pedoman, termasuk perdebatan tentang pelaksanaan Penagihan menurut Undang-

undang. Peraturan tentang Assortment of Assessments by Pressure Letter.

Kehadiran perdebatan tugas seperti itu, apakah pertanyaan administrasi, pertanyaan evaluasi biaya, atau perdebatan kisaran biaya, akibatnya melemahkan pemilihan biaya.

5. pemberian izin, usul, dan penataan administrasi publik yang tidak ada atau tidak sesuai bidang kewajibannya;
  - a. Kurangnya instruksi pada semua aparatur departemen;
  - b. Kurangnya kemampuan untuk mendengarkan, menanggapi, dan mencari solusi atas keluhan pegawai, baik sebagai pengumpul data, penganalisis data, penghitungan, penerbitan SKPD, maupun penagihan
  - c. Sistem self assessment belum diterapkan dalam pemungutan pajak daerah.

## **2.2 Pajak Hotel**

### **2.2.1 Definisi Pajak Hotel**

*Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, bea penginapan adalah administrasi yang diberikan oleh penginapan secara angsuran, termasuk administrasi penunjang sebagai pelengkap penginapan yang memberikan akomodasi dan kenyamanan, termasuk perkantoran olah raga dan hiburan. Biaya penginapan merupakan biaya administrasi penginapan (Siagian, 2005). Dengan cara ini, untuk berkumpul di suatu rezim atau wilayah metropolitan, pemerintah terdekat harus terlebih dahulu memberikan Pedoman Wilayah Tugas Penginapan. Pedoman ini akan menjadi alasan fungsional yang sah untuk pelaksanaan*

*khusus berbagai macam dan pilihan biaya penginapan di setiap wilayah atau kota.*

### **2.2.2 Objek Pajak Hotel**

*Menurut Peraturan Daerah Kota kabupaten pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Subjek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang diberikan dengan pembayaran di hotel, antara lain:*

- 1) Kenyamanan jarak pendek atau panjang atau kantor tempat tinggal termasuk motel, penginapan, kenyamanan perjalanan dan ruang pertemuan.
- 2) Administrasi pendukung sebagai fasilitas lengkap jarak pendek atau jarak jauh atau kantor pusat yang memberikan akomodasi dan kenyamanan, seperti telepon, web, fotokopi, cuci, pengepresan, transportasi dan kantor perbandingan lainnya yang diberikan atau diawasi oleh penginapan.

### **2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

*Menurut Peraturan Daerah Pajak Hotel Daerah Kabupaten Pohuwato No. 13 Tahun 2011, Subyek penanggungan penginapan adalah orang pribadi atau unsur yang mencilil orang atau badan yang bekerja di penginapan. Sedangkan wajib adalah orang/badan penyelenggara.*

### **2.2.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel**

*Alasan pemungutan biaya penginapan adalah jumlah yang terutang atau terutang kepada penginapan, yang ditetapkan dengan batas 10% tidak sepenuhnya diatur oleh pedoman provinsi. Sebagai aturan, biaya*

*penginapan ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:*

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan}}{\text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Yang Dilakukan}}$$

### **2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

*Dikumpulkan berdasarkan jaminan pejabat atau dibayar oleh warga sendiri. Warga memenuhi kontribusi pengeluaran yang dikumpulkan dengan menggunakan Surat Putaran Wilayah (SKPD) atau laporan lain yang sebanding. Warga memenuhi kewajiban kewajibannya sendiri dengan memanfaatkan Surat Keterangan Catatan Pemerintah Daerah (STTPD), Surat Tanda Penilai Pengeluaran Daerah (SKPDKB) dan Surat Evaluasi Pengeluaran Daerah (SKPDKBT).*

*Pajak dipungut berdasarkan penetapan bupati atau dibayar oleh wajib pajak sendiri. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan yang dipungut dengan menggunakan Surat Edaran Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKBT).*

*Pengumpulan Pajak hotel dalam fase berikut ini:*

- 1) Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

*Warga melapor kepada Pejabat atau pejabat yang ditunjuk*

sehubungan dengan biaya penginapan. Oleh karena itu, warga negara harus melengkapi formulir Penilaian Wilayah (SPPTPD) yang harus ditunjukkan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya jangka waktu tugas, dan dilengkapi dengan arsip angsuran penginapan sesuai pilihan Pejabat. Permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat dibolehkan asalkan ada alasan yang sah. SPPTPD dianggap tidak terjawab dalam hal Warga Negara tidak memenuhi persyaratan pengisian dan pencatatan SPPTPD yang ditentukan. Warga yang tidak melapor atau melapor tanpa memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya akan dikenakan denda sesuai dengan pengaturan pedoman provinsi.

## 2) Pemungutan Pajak Hotel

Pemilihan biaya penginapan tidak dapat dilakukan dengan premis diskon, yang berarti bahwa seluruh rangkaian latihan pemilihan biaya penginapan tidak dapat diberikan kepada orang luar. Meskipun ada kemungkinan partisipasi dengan pihak luar yang bertanggung jawab atas bermacam-macam, termasuk pencetakan dokumen pajak, mengirim surat kepada warga atau mengumpulkan informasi tentang barang dan warga, memastikan berapa banyak tagihan yang harus dibayar, mengamati angsuran tugas dan mengumpulkan biaya.

## 3) Penetapan pajak hotel

Mengingat SPTPD yang diumumkan oleh warga, pejabat atau pejabat yang ditunjuk buapti memutuskan beban penginapan dengan memberikan

*Surat ketetapan pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dibayar oleh Warga Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan SKPD dari Warga. Dengan asumsi Warga Negara mengabaikan atau lalai membayar biaya yang terutang di SKPD setelah jangka waktu yang telah ditentukan, maka Warga Negara akan tergantung pada izin peraturan sebagai premi 2% (dua persen) setiap bulan dan dikenakan biaya dengan memberikan Surat peringatan pajak daerah (STPD).*

#### 4) Evaluasi Biaya

*Dalam waktu sekitar lima tahun setelah pengeluaran diharapkan, Pejabat dapat memberikan surat penilaian tugas wilayah (SKPDKB) dan tambahan surat penilaian tugas provinsi (SKPDKB), Surat Penilaian Daerah Nol (SKPDN). . Surat penilaian tugas diberikan mengingat penilaian SPPTD yang disusun oleh Warga Negara.*

#### 5) Angsuran Biaya Penginapan

*Biaya penginapan yang harus dibayar akan dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pedoman wilayah, yaitu 1 (satu) bulan jadwal. Angsuran pungutan yang terutang dilakukan kepada penyimpan wilayah atau organisasi lain yang dipilih oleh Pejabat pada waktu yang tertera dalam SPPTD, SKPD, SKPDKB, SKPDKB dan STPD. Dalam hal angsuran penilaian dilakukan di tempat lain tertentu, pengembalian penerimaan biaya harus disimpan ke dalam penyimpanan provinsi selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau di dalam tidak seluruhnya diselesaikan oleh Pejabat. Angsuran tagihan dilakukan dengan menggunakan Surat*

*Angsuran Tugas Daerah (SSPD). Permohonan warga untuk angsuran biaya yang harus dibayar dalam porsi diselesaikan secara rutin dan berurutan dengan biaya pinjaman sebesar 2% (dua persen) secara konsisten dari berapa banyak penilaian yang belum atau bergantian kekurangan dalam jangka waktu tertentu setelah dipenuhinya kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya.*

#### 6) Assortment Penilaian Penginapan

*Jika biaya penginapan yang jatuh tempo tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, Pejabat atau Pejabat yang Ditugaskan akan mengumpulkan penilaian. Pemilahan muatan dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat teguran atau surat pembanding sebagai awal dari kegiatan pemilahan tugas. Surat peringatan kewenangan atau surat penetapan tersebut diberikan tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran biaya dan diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran penguasa atau surat pemberitahuan resmi atau surat pembanding lainnya, Warga Negara harus membayar kewajibannya. Selain itu, dengan asumsi berapa biaya yang harus dibayar masih harus dibayar dan tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu yang ditunjukkan dalam surat pemberitahuan terlebih dahulu atau surat peringatan atau surat perbandingan, berapa bea yang harus dibayar akan tergantung pada penyitaan dan dapat disita, penghindaran, penghindaran, dan pengambilan tahanan dapat dilakukan dalam hal warga negara tidak membayar kewajiban pengeluarannya.*

7) protes

*Warga yang kecewa dengan penilaian tugas yang dilakukan oleh Pejabat dapat mendokumentasikan rayuan kepada Pejabat atau pejabat yang ditunjuk. Dengan asumsi Warga menilai seberapa besar kewajiban dalam Surat Penilaian Biaya (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB) keliru, Warga dapat mendokumentasikan bujukan bagi Pejabat yang memberikan Surat Penilaian Penilaian. Protes yang diajukan adalah asli atau bermakna dengan memastikan jumlah yang harus dibayar menurut perkiraan Warga Negara. Perhitungan tergantung pada pengaturan pedoman biaya penginapan negara tertentu. Pilihan Ofisial diserahkan kepada Warga untuk dieksekusi. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Warga Negara tidak akan senang dengan pilihan daya pikat tersebut, sehingga Warga Negara diberikan pilihan untuk mendapatkan Surat Tugas Penilaian dari pengadilan sesuai pengaturan peraturan. Warga negara dapat mendokumentasikan bujukan untuk pengadilan biaya di udara oleh pejabat atau pejabat atau pejabat yang didelegasikan.*

#### **2.2.6 Sanksi Administrasi**

*Dalam undang – undang daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Bupati berhak menutup dan memberi sanksi berupa mencabut izin usaha bagi pengusaha apabila:*

- 1) Wajib pajak Melalaikan kewajiban untuk membayar pajak selama dua bulan berturut-turut;*
- 2) Penagihan dengan sengaja tanpa menggunakan bukti pembayaran yang*

*sah atau penagihan yang tidak disetorkan ke kas daerah;*

*3) Tidak melayani petugas dengan baik dan/atau menolak melakukan penyidikan tanpa alasan yang baik dan terhadap inspektur yang sah, disertai surat tugas dari Bupati.*

### **2.3 Pajak Restoran/Rumah Makan**

#### **2.3.1 Definisi Pajak Restoran**

*Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan retribusi kepada pemerintah kota. Berawal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadikan perpajakan sebagai salah satu perwujudan negara, ditegaskan bahwa pembebanan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan wajib lainnya, diarahkan oleh regulasi. Oleh karena itu, berbagai harga restoran harus didasarkan pada pedoman terdekat.*

*Pedoman lingkungan tentang biaya restoran membuat kepastian yang sah sehubungan dengan subjek beban, objek biaya, tarif biaya, dan strategi berbagai penilaian. Demikian juga, otorisasi tanpa henti untuk setiap pelanggaran pengeluaran diarahkan dalam pedoman lokal. Pengumpulan pendapatan biaya rumah makan adalah pendapatan lokal yang sangat berharga untuk mendukung pergantian acara lokal.*

#### **2.3.2 Subjek Pajak Restoran/Rumah Makan**

*Sesuai Peraturan Daerah Pohuwato Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tugas daerah, subjek retribusi restoran adalah bantuan yang diberikan oleh*

*pihak restoran/rumah makan. Pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran/rumah makan seperti yang diharapkan mencakup penawaran makanan dan minuman tambahan yang diminum oleh pembeli, baik yang diproduksi di tempat atau dari tempat lain.*

### **2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

*Berdasarkan Peraturan Daerah Pohuwato Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, maka subjek retribusi adalah orang perseorangan atau unsur yang membeli makanan dan minuman dari warung makan. Sementara itu, pemilik adalah orang atau yang bekerja di rumah makan. Setiap pemilik yang disebutkan di atas harus memiliki izin tempat makan untuk beroperasi dari Pejabat atau pejabat lain yang disebut.*

### **2.3.4 Dasar Tarif Pemungutan/Perhitungan Pajak Restoran**

*Berdasarkan Perda Pohuwato Nomor 7 Tahun 2010, tarif retribusi tempat makan ditetapkan sebesar 10% Alasan untuk mengumpulkan biaya restoran adalah berapa banyak angsuran yang telah atau seharusnya diperoleh rumah makan.*

- (1) Besaran pokok biaya restoran yang terutang ditentukan dengan menaikkan tarif 10% dengan tarif dasar sesuai dengan pedoman negara yang ditetapkan.
- (2) Pengusaha restoran harus menambahkan pajak restoran untuk layanan di restoran dengan tarif pajak yang berlaku.
- (3) Dalam hal usaha jasa restoran tidak melakukan penambahan pajak jasa

restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, besarnya biaya tersebut menjadi dasar pengenaan pajak jasa restoran.

### **2.3.5 Pajak Terutang atau Masa Pajak**

*Sesuai Peraturan Daerah Pohuwato Nomor 7 Tahun 2010, jangka waktu retribusi restoran adalah 1 (satu) bulan jadwal. Biaya dibayarkan pada jam angsuran untuk administrasi rumah makan. Biaya yang harus dibayar dikumpulkan di ruang tempat. Tata cara penetapan tarif restoran juga diatur oleh Pedoman Resmi.*

## **2.4 Analisis kontribusi dan Efektivitas**

### **2.4.1 Analisis Kontribusi**

*Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu Contribution, Contribution yang artinya partisipasi, keterlibatan, self-engagement atau sumbang. Dalam hal ini, berarti sumbang tersebut dapat berupa materi atau tindakan. Hal-hal material, seperti seseorang yang meminjamkan kepada pihak lain untuk kepentingan bersama.*

*Kontribusi dalam arti tindakan adalah perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian berdampak positif atau negatif bagi orang lain. Misalnya, seseorang melakukan pengabdian masyarakat di lingkungannya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungannya yang berdampak positif bagi penduduk dan pendatang.*

*Berkontribusi berarti bahwa individu juga berusaha meningkatkan*

*efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan menajamkan peran, yang nantinya menjadi bidang spesialis, lebih tepatnya sesuai keahlian. Kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik itu penalaran khusus, administrasi, keahlian yang mengesankan, uang dan lain-lain (Anne Ahira: 2012).*

*Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, gagasan kontribusi adalah kontribusi, sedangkan menurut referensi Kata Finansial (T. Guritno 1992:76), gagasan kontribusi adalah segala sesuatu yang dicapai bersama dengan berbagai pertemuan dengan tujuan akhir. biaya tertentu atau kemalangan. Oleh karena itu, kontribusi di sini dapat diartikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh pembayaran lokal yang mendasari untuk konsumsi perbaikan lokal habis-habisan.*

*Arti kontribusi seperti yang ditunjukkan oleh Dany H's. referensi kata sains terkenal (2006:264) "Hadiah dicirikan sebagai hadiah atau bantuan." Untuk sementara, sesuai dengan referensi Kata Bahasa Indonesia Keseluruhan, itu ditandai sebagai: "Sebagai hadiah uang tunai untuk afiliasi, hadiah".*

*Dari sini dapat disimpulkan bahwa iuran adalah sumbangan yang diberikan oleh suatu sistem pajak dan bea yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.*

#### **2.4.2 Analisis Efektifitas**

*Efektivitas/efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001:24) adalah: "Efektivitas adalah pemanfaatan aset, kantor dan kerangka,*

sebagian, yang telah sengaja diselesaikan sebelumnya, untuk memberikan berbagai produk untuk administrasi yang diberikannya.

Dari definisi ini, cenderung dianggap bahwa kelangsungan hidup umumnya erat terkait antara hasil normal dan hasil asli yang dicapai. Viabilitas adalah proporsi kemajuan asosiasi dalam mencapai tujuannya. Sebuah asosiasi dipandang sebagai menarik ketika telah berlaku sehubungan dengan pengukuran hingga asumsi.

Abdul Halim (2008:234) dalam Lilik Yunanto (2015) menjelaskan bahwa pengukuran efektivitas yang lebih akurat melibatkan kriteria berbasis keputusan. Perhitungan efektifitas menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase hasil pemungutan pajak hotel dan pemungutan pajak reklame semakin efektif, begitu pula sebaliknya semakin kecil persentasenya maka semakin kurang efektif pemungutan pajak hotel dan pemungutan pajak reklame.

## 2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah terdekat untuk mensubsidi pelaksanaan peningkatan dan kemandirian wilayah sesuai dengan potensi provinsi sebagai bentuk desentralisasi. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Nilai Uang antara Daerah dan Daerah, PAD adalah gaji yang dihasilkan oleh daerah, yang dikumpulkan berdasarkan pedoman provinsi sesuai dengan pengaturan

*peraturan dan pedoman. Menurut Halim (dalam Annisa, 2017), pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua pembayaran teritorial mulai dari sumber keuangan unik provinsi.*

#### **2.5.2 Sumber pendapatan asli daerah**

*Mengingat Peraturan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keserasian Keuangan Antara eksekutif dan Legislatif Daerah, PAD diperoleh dari retribusi daerah, pungutan daerah, akibat dari keterpencilan kekayaan daerah para eksekutif dan PAD asli lainnya.*

#### **2.5.3 Kendala peningkatan PAD**

*Pemerintah daerah yang dikelola negara seharusnya lebih otonom dalam hal melaksanakan kemerdekaan teritorial dan desentralisasi moneter. Meskipun demikian, hingga pemberitahuan lebih lanjut, masih ada banyak masalah yang dilihat oleh negara-negara tetangga terkait dengan upaya untuk meningkatkan pembayaran teritorial, termasuk:*

- 1) Kebutuhan uang yang tinggi yang tidak diimbangi dengan batas keuangan daerah, menimbulkan lubang keuangan.
- 2) Sifat administrasi publik yang belum tegas menyiratkan bahwa barang-barang bantuan publik yang benar-benar dapat ditawarkan kepada masyarakat dipandang negatif. Kondisi saat ini juga membuat orang ragu untuk membayar biaya dan biaya lingkungan.
- 3) Kerangka kerja dan kantor-kantor publik yang lemah.
- 4) Menjaga Aset Bantuan Pemerintah Pusat (Aset Peruntukan Umum Fokal

cukup tidak).

- 5) Belum diketahui seberapa besar kemampuan yang masuk akal dari pendapatan daerah.

## 2.6 Penelitian Sebelumnya

*Penelitian yang mengkaji penilaian penginapan dan biaya rumah makan/restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) telah dilakukan oleh beberapa peneliti, khususnya:*

*Penelitian yang dipimpin oleh Syarif (2016) untuk membedah kelangsungan dan kontribusi biaya penginapan, biaya rumah makan, biaya pemberitahuan dan bea keluar terhadap pendapatan daerah di kota Tangerang tahun 2010-2014. Teknik yang digunakan adalah pemeriksaan spellbinding. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas normal adalah lima tahun. biaya penginapan 114,97%, biaya restoran 124,50%, biaya iklan 116,89% dan biaya berhenti 125,28%. Sementara itu, kontribusi pendapatan biaya penginapan, biaya rumah makan, penilaian komersial, dan biaya pemberhentian terhadap pendapatan unik Tangerang sangat kecil. Biaya penginapan normal, biaya rumah makan, bea pemberitahuan, dan biaya pemberhentian menyumbang hampir 5% untuk PAD 2010-2014.*

*Penelitian yang diarahkan oleh Intan, T., Lengkong, M., Ilat, V., Wangkar, A. (2015) untuk mengkaji potensi dan efektivitas ragam penilaian melalui buletin di kota Bitung, strategi yang digunakan adalah kuantitatif ekspresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas biaya promosi berada pada klasifikasi “sangat kuat” pada tahun 2011, 2012 dan 2013,*

*sedangkan pada tahun 2014 berada pada kategori “berhasil”. Berdasarkan perhitungan informasi yang dapat diverifikasi, kemungkinan pendapatan Bea Cukai Kota Bitung pada tahun 2015 adalah Rp. 91.376.453.510.*

*Kajian Efektivitas dan Kontribusi Penilaian Pendapatan Penginapan dan Rumah makan terhadap PAD Kota Manado dipimpin oleh Edward W. Sumptuous (2013). Hasil Pemeriksaan 1. Secara umum kontribusi Inn Assessment dan Eatery Duty tahun 2007-2011 merupakan kontribusi yang layak terhadap PAD, dengan tujuan agar dapat mempengaruhi seberapa besar perolehan PAD. Untuk Inn Assessment, tingkat kontribusi yang paling penting adalah 8,11% pada tahun 2010 dan tingkat kontribusi terendah adalah 5,38% pada tahun 2008, dengan kontribusi normal sebesar 6,88%. Sementara itu, eatery charge memiliki kontribusi normal sebesar 21,72%, dengan kontribusi tertinggi sebesar 24,47% pada tahun 2009 dan kontribusi terendah sebesar 19,76% pada tahun 2011.2. Tingkat efektivitas Inn and Café Duty di Kota Manado sangat layak karena tingkat kelayakan secara umum mencapai di atas 100 persen.*

*Penelitian yang disutradarai oleh R.N. Mengingat penelitian kelayakan, kontribusi dan kemampuan biaya pemberitahuan dan biaya penginapan pada pendapatan lokal kota Kotamobagu, strategi logis yang digunakan adalah menarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas biaya promosi cukup menarik dan biaya penginapan dianggap belum mampu pada tahun 2015. Secara umum, kontribusi tugas pemberitahuan dan biaya penginapan untuk tahun buku 2012-2015 memberikan kontribusi yang layak. kontribusi untuk*

*Bantal. Kemungkinan pendapatan untuk biaya iklan dan penilaian penginapan akan meningkat pada tahun 2016.*

*Penelitian yang disutradarai oleh L.K. Debby Debora (2014) untuk meneliti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Bantal) terhadap pemenuhan APBD Kota Medan, strategi yang digunakan adalah jitu dan mendekati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pemenuhan APBD Kota Medan mencapai angka normal sebesar 28,86% pada periode 2008-2012, dari angka tersebut dapat diduga sangat baik bahwa kontribusi local unique pay to teritorial pay. Pendapatan unik kota Medan dan APBD 2008-2012 dengan ukuran kekuatan moneter provinsi sedang. Selain itu, kontribusi paling tinggi diberikan pada tahun 2012 dengan model kekuatan moneter lokal sebesar 38,28% dan kontribusi paling rendah pada tahun 2009 dengan tingkat 19,70% pada standar kekuatan moneter lokal sedang.*

## **2.7 Kerangka Pikir**

*Sistem dalam tinjauan ini menggambarkan urutan masalah untuk melihat seberapa besar dampak kontribusi dan efektivitas Penilaian Penginapan dan Pengeluaran rumah makan/Restoran terhadap pendapatan sekitar.*

*Dimana yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Hotel dan Reklame yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Serta bagaimana Efektifitas dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar berikut:*

*Gambar 2.1 Kerangka Pikir*



## 2.8 Hipotesis

*Berdasarkan dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:*

1. kontribusi pajak hotel dan pajak rumah makan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Efektifitas pajak hotel dan pajak rumah makan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini obyek penelitiannya yaitu, mengenai Kontribusi dan efektifitas adanya Pajak hotel dan Pajak Rumah Makan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

##### **1. Variabel terikat (Y)**

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen variabel).

Dalam hal ini pendapatan asli daerah.

##### **2. Variabel bebas (X)**

Variabel yang digunakan secara independen mempengaruhi variabel dependen yaitu besarnya kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran.

#### **3.2 Prosedur Pengambilan Sampel**

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik convenience sampling, yaitu model convenience sampling. Bentuk sampling ini diwujudkan dalam metode zero-probability sampling, dimana anggota sampel dipilih atau diambil secara acak berdasarkan kemudahan memperoleh data atau unit sampling yang dibutuhkan.

Tandanya mudah dihubungi, tidak sulit atau mudah diukur, dan kooperatif (Abdul Hamid, 2004:24).

Yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah Keseluruhan pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten pohuwato.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Secara umum, penelitian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk karya ilmiah. Penelitian dalam arti yang lebih luas adalah penyelidikan yang sempurna terhadap suatu masalah atau objek tertentu. Metode penelitian bisa disebut penyelidikan analitik Bagus. Menyiratkan pencarian, pemilihan, penanganan, dan penyajian informasi yang valid, konkret, dan asli serta diperlukan dalam suasana yang mempengaruhi untuk percakapan tambahan. Oleh karena itu, pembuat menggunakan strategi pengumpulan informasi berikut:

1. Studi pustaka. Dalam strategi ini, penulis melakukan penelitian dengan berkonsentrasi pada buku-buku perpustakaan, tulisan, dan bahan pembicaraan yang erat kaitannya dengan percakapan ujian.
2. Studi lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan kumpulan informasi yang diselesaikan secara langsung di bidang studi subjek, khususnya Organisasi Uang Wilayah Rezim Pohuwato, dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi berikut:
3. Persepsi, khususnya persepsi terhadap objek informasi dan urutan suatu gerakan, bermacam-macam, perkiraan dan pencatatan informasi yang diperoleh.

4. Wawancara, yaitu prosedur pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab tentang topik.

### **3.4 Metode Analisis**

Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat keputusan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Bad, maka peneliti menggunakan Keuangan Daerah analisis statistik sampel dengan bentuk pengajian sebagai berikut:

#### **3.4.1 Uji Hipotesis**

##### **3.4.1.1 Regresi Berganda**

Model statistik yang digunakan adalah model regresi linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) dengan variabel yang dihasilkan. Faktor penyebab umumnya dilambangkan dengan X atau juga sebagai prediktor, sedangkan variabel efek dilambangkan dengan Y atau juga sebagai reaksi. Model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependen), (Pendapatan asli daerah)

X1 = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (independent), Kontribusi Pajak Hotel dan pajak rumah makan

$X_2$  = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (independent),

Efektifitas Pajak Hotel dan pajak rumah makan

$a$  = Konstanta

$b$  = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

$e$  = *Standar Error*

### 3.4.1.2 Uji t

Pengujian koefisien regresi secara parsial dimaksudkan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (tingkat signifikansi) yang ditentukan untuk penelitian ini dengan nilai probabilitas hasil penelitian. Dengan tingkat signifikansi (nilai probabilitas) ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas hasil penelitian  $<$  nilai probabilitas peneliti (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan hipotesis alternatif diterima.
2. Jika nilai probabilitas hasil penelitian  $>$  nilai probabilitas peneliti (0,05), maka  $H_0$  diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

### 3.4.1.3 Uji F

Secara simultan pengujian pengaruh variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel terikat dilakukan dengan menguji besarnya perubahan nilai variabel terikat, yang dapat dijelaskan dengan perubahan nilai semua variabel bebas. (Algifari, 2000). Untuk itu perlu dilakukan uji ANOVA atau uji F.

Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (nilai probabilitas) yang ditentukan untuk penelitian ini dengan nilai probabilitas hasil penelitian. Tingkat signifikansi untuk penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05.

Dengan tingkat signifikansi (nilai probabilitas) ditetapkan sebesar 0,05, kriteria pengujianya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas hasil penelitian  $<$  nilai probabilitas peneliti (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan hipotesis alternatif diterima
2. Jika nilai probabilitas hasil penelitian  $>$  nilai probabilitas peneliti (0,05), maka  $H_0$  diterima dan hipotesis alternatif ditolak

### **3.5 Operasional Variabel Penelitian**

Variabel operasional adalah definisi dan seperangkat variabel yang digunakan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah jenis variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi, variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi dan efektifitas Pajak hotel dan Pajak rumah makan adalah suatu kewajiban dari pemilik usaha dalam membayar hutang pajaknya tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (X) dan kriteria Kontribusi dan efektifitas Pajak hotel dan Pajak rumah makan pada penelitian ini dilihat dari keaktifan wajib pajak dalam membayar hutang pajaknya.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah seluruh pajak yang diterima oleh daerah pada suatu tahun pajak, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato diperoleh dari beberapa penerimaan pajak berupa Pajak hotel, dan Pajak Rumah Makan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

#### **4.1 Sejarah singkat Lokasi Penelitian**

Sejarah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato berawal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Organisasi perangkat Daerah yang merupakan Penjabaran dari Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada tanggal 6 April 2005 Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan BPKD Kabupaten Pohuwato dibentuk.

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pohuwato adalah Penggabungan dari Dua Lembaga Pemerintah Daerah Secara terpisah yaitu :

1. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Pohuwato dengan Tugas Pokok dan Fungsi Mengelola Pendapatan Daerah.
2. Bagian Keuangan yang semula tergabung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato (SETDA) dengan Tugas Pokok dan Fungsi Mengelola Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Daerah, Badan Pengelola

Keuangan Daerah Menyesuaikan Menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.

#### **4.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif**

Pada penelitian ini penulis membahas 2 variabel X yang mempengaruhi variabel Y, masing-masing variabel X tersebut adalah Kontribusi Pajak hotel dan pajak rumah makan(X1), Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak rumah makan(X2), sedangkan variabel (Y) yaitu Pendapatan asli daerah, adapun total pertanyaan/pernyataan sebanyak 14 item dan setiap item pertanyaan/pertanyaan direspon oleh 45 orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/pernyataan, selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yakni :

**Bobot terendah X item X jumlah responden =  $1 \times 1 \times 45 = 45$**

**Bobot tertinggi X item X jumlah responden =  $5 \times 1 \times 45 = 225$**

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi yaitu :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{225 - 45}{5} = 36$$

**Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item**

Range	Kategori
180 - 225	Sangat besar
144 - 179	Besar
108–143	Sedang
72–107	Kecil
36 – 71	Sangat kecil

Sumber : Data Olahan 2022

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada masing – masing indikator untuk setiap variabel adalah :

#### **4.2.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel Kontribusi (X1)**

Hasil penelitian dan analisis deskriptif kuantitatif Kontribusi(X1) sebagai berikut:

**Tabel. 4.2. Tanggapan Responden pada Item 1 kontribusi(X1)**

X1.1					
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	3.00	6	18	13.3	13.3
	4.00	28	112	62.2	75.6
	5.00	11	55	24.4	100.0
	Total	45	185	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 4.2. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama adalah sebanyak 11 orang responden menjawab sangat setuju atau 24.4% dari 45total responden, 28 responden atau 62.2% yang mengatakan setuju, 6 atau 13.3% responden yang mengatakan ragu-ragu, dan total 185, artinya ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.3. Tanggapan Responden pada Item 2kontribusi(X1)****X1.2**

	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	9	27	20.0	20.0
4.00	17	68	37.8	57.8
5.00	19	95	42.2	100.0
Total	45	190	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 2, 19 responden atau 42.2% yang menjawab sangat setuju, 17 responden atau 37.8% yang menjawab setuju, dan 9 responden atau 20 % yang mengatakan ragu-ragu dari 45 total responden dan total skor adalah 190, ini masuk kategori sangat sangat besar.

**Tabel. 4.4. Tanggapan Responden pada Item 3kontribusi(X1)****X1.3**

	Frequency	skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	21	15.6	15.6
4.00	26	104	57.8	73.3
5.00	12	60	26.7	100.0
Total	45	185	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 3, 12 orang responden atau 26.7 % yang menjawab sangat setuju, 26 atau 57.8% responden yang menjawab setuju, 7 orang atau 15.6% responden yang menjawab ragu – ragu, dari 45 responden yang ada, Sedangkan total skor adalah 185, ini masuk kategori sangat sangat besar.

**Tabel. 4.5. Tanggapan Responden pada Item 4kontribusi(X1)**

X1.4				
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	24	72	53.3	53.3
4.00	19	76	42.2	95.6
5.00	2	10	4.4	100.0
Total	45	158	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 4, sebanyak 2 orang responden atau 4.4% yang menjawab sangat setuju, 19 orang responden atau 42.2% yang menjawab setuju, 24 orang responden atau 53.3% yang menjawab ragu – ragu dari 45 total responden. Sedangkan total skor adalah 151, ini masuk kategori besar.

**Tabel. 4.6. Tanggapan Responden pada Item 5kontribusi(X1)**

X1.5				
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	9	28	20.0	20.0
4.00	21	84	46.7	66.7
5.00	15	75	33.3	100.0
Total	45	187	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 5, sebanyak 15 orang responden atau 33.3% yang menjawab sangat setuju, 21 orang responden atau 46.7% yang menjawab setuju, 9 orang responden atau 20 % yang menjawab ragu – ragu dari 45 total responden. Sedangkan total skor adalah 187, ini masuk kategori sangat besar.

#### 4.2.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif variabel Efektivitas (X2)

Hasil penelitian dan analisis deskriptif kuantitatif Variabel Efektivitas (X2) sebagai berikut :

**Tabel. 4.7. Tanggapan Responden pada item 1Efektivitas (X2)**

X2.1					
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid 3.00	26	78	57.8	57.8	
4.00	9	36	20.0	77.8	
5.00	10	50	22.2	100.0	
Total	45	164	100.0		

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 4.7. di atas, bahwa tanggapan responden pada item ke 1 sebanyak 10 responden atau 22.2% yang menjawab sangat setuju, 9 responden atau 20% yang menjawab setuju, 26 responden atau 57.8 % yang mengatakan ragu-ragu, dari total 45 responden dan total skor adalah 164, ini masuk kategori besar

**Tabel. 4.8. Tanggapan Responden pada item 2Efektivitas (X2)**

X2.2					
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid 3.00	6	18	13.3	13.3	
4.00	29	116	64.4	77.8	
5.00	10	50	22.2	100.0	
Total	45	184	100.0		

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 2 sebanyak 10 responden atau 22.2% yang menjawab sangat setuju, 29 responden atau 64.4% yang menjawab setuju, 6

responden atau 13.3% yang menyatakan ragu-ragu dari total responden 45 orang dan total skor adalah 184, ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.9. Tanggapan Responden pada item 3Efektivitas (X2)**

**X2.3**

	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	24	17.8
	4.00	23	92	51.1
	5.00	14	70	31.1
	Total	45	186	100.0

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 3, sebanyak 14 responden atau 31.1% yang menjawab sangat setuju, 23 responden atau 51.1% yang menjawab setuju, 8 responden atau 17.8% yang menjawab ragu-ragu dari 45 total responden, dan total skor adalah 186, ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.10. Tanggapan Responden pada item 5Efektivitas (X2)**

**X2.4**

	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	18	13.3
	4.00	29	116	64.4
	5.00	10	50	22.2
	Total	45	184	100.0

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 5, sebanyak 10 responden atau 22.2% yang menjawab sangat setuju, 29 responden atau 64.4% yang menjawab setuju, 6 responden atau 13.3% responden yang menjawab ragu-ragu dari 45 total responden, dan total skor adalah 184, ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.11. Tanggapan Responden pada item 5Efektivitas (X2)**

X2.5				
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	26	78	57.8
	4.00	13	52	28.9
	5.00	6	30	13.3
	Total	45	160	100.0

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 4, sebanyak 6 responden atau 13.3 % yang menjawab sangat setuju, 13 responden atau 28.9 % yang menjawab setuju, 26 responden atau 57.8 % responden yang menjawab ragu-ragu dari 45 total responden, dan total skor adalah 160, ini masuk kategori besar.

#### **4.2.3 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel Pendapatan Asli Daerah**

##### **(Y)**

Hasil penelitian dan analisis deskriptif kuantitatif variabel Pendapatan Asli Daerah (Y)

**Tabel. 4.12. Tanggapan Responden Item 1 Pendapatan Asli Daerah(Y)**

Y.1				
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	26	78	57.8
	4.00	9	36	20.0
	5.00	10	50	22.2
	Total	45	164	100.0

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel 4.12. diatas, bahwa tanggapan responden pada item ke 1 dari 45 responden 10 responden atau 22.2 % yang menjawab sangat setuju, 9 Responden

20 % menjawab setuju, 26 responden 57.8 % menjawab ragu – ragu dari 45 total responden, dan total skor adalah 164, ini masuk kategori besar.

**Tabel. 4.13 . Tanggapan Responden Item 2 Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Y.2

	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	13.3	13.3
	4.00	29	64.4	77.8
	5.00	10	22.2	100.0
	Total	45	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 2 sebanyak 10 responden atau 22.2% yang menjawab setuju, 29 responden atau 64.4 % yang menjawab setuju, 18 responden atau 13.3 % Yang Menjawab bragu – ragu dari 45 total responden, dan total skor adalah 184, ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.14. Tanggapan Responden Item 3Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Y.3

	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	17.8	17.8
	4.00	23	51.1	68.9
	5.00	14	31.1	100.0
	Total	45	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 3 sebanyak 14 responden atau 31.1% yang menjawab sangat setuju, 23 responden atau 51.1 % yang menjawab setuju, 8 responden atau 17.8 % yang menjawab ragu – ragu dari 45 total responden dan total skor adalah 186, ini masuk kategori sangat besar.

**Tabel. 4.15. Tanggapan Responden Item 4 Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Y.4					
	Frequency	Skor	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	3.00	11	33	24.4	24.4
	4.00	34	136	75.6	100.0
	Total	45	169	100.0	

Sumber : Data Olahan 2022

Tanggapan responden pada item ke 4, sebanyak 34 responden atau 75.6 % yang menjawab setuju, 11 responden atau 24.4 % yang menjawab Ragu – ragu, dari 45 total responden dan total skor adalah 169, ini masuk kategori besar.

### 4.3. Pembahasan Analisis Regresi

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.594	4.265		.374	.071
X1	.534	.438	.006	.940	.048
X2	.456	.741	.286	.931	.030

a. Dependent Variable: Y

$$Y = 1,594 + 0,534X1 + 0,456X2$$

Dari persamaan regresi berganda di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai konstant atau nilai tetap sebesar 1,594 mengandung arti bahwa apabila variabel Kontribusi (X1) dan Efektivitas (X2) memiliki nilai sama dengan nol, maka besarnya Pendapatan Asli Daerah adalah 1,594.

Sedangkan besarnya koefisien Kontribusi (X1) adalah 0,534 mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan Kontribusi, maka Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 0,534 dengan asumsi bahwa variabel lainnya diabaikan. Besarnya koefisien Efektivitas (X2) adalah 0,456 mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan efektivitas, maka Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 0,456 dengan asumsi bahwa variabel lainnya diabaikan.

#### **4.4. Uji Validitas**

Uji Validitas, merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil olahan data diperoleh nilai  $r$  sebesar 0,287 atau 28,70% hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 28,70 % ini berarti secara simultan memiliki hubungannya atau korelasinya rendah . Sedangkan  $R$  square ( $r^2$ ) sebesar 0,082 atau 8,20% artinya kontribusi sub variabel bebas secara simultan sebesar 8,20 % terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.5. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas untuk  $F$  ini digunakan untuk menguji kelayakan atau signifikansi penelitian dimana  $\alpha = 0,05$  dan tingkat kebebasan (df)  $n - 2$  yaitu  $45 - 2 = 43$ . Dari hasil olahan data untuk uji  $F$  diperoleh  $F$  hitung sebesar  $0,883 > \text{sig.}$  sebesar 0,045 dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat simpulkan bahwa secara simultan adalah layak atau signifikan.

Untuk uji t digunakan sebagai uji signifikan secara parsial adalah :

- Kontribusi (X1) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana t hitung  $0,940 > \text{sig. sebesar } 0,048$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan.
- Efektivitas (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana t hitung  $0,931 > \text{sig. sebesar } 0,030$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Kontribusi (X1) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana  $t$  hitung  $0,940 > \text{sig. sebesar } 0,048$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan.
2. Efektivitas (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana  $t$  hitung  $0,931 > \text{sig. sebesar } 0,030$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan.
3. Dari hasil olahan data untuk uji F diperoleh  $F$  hitung sebesar  $0,883 > \text{sig. sebesar } 0,045$  dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat simpulkan bahwa secara simultan adalah layak atau signifikan

#### **5.2 SARAN**

1. Untuk praktisi agar perlu meningkatkan pengetahuan tentang pajak daerah terhadap para pelaku usaha terutama bagi para pelaku dibidang rumah makan dan penginapan.
2. Untuk akademisi agar menjadi panduan kedepan bagaimana cara penegelolaan keuangan daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni,Dwi. (2014). *Analisis potensi penerimaan pajak reklame dan efektivitas pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.* Jurusan Akuntansi: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ardilas,D.F. (2013). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi ( The Potensial Analysis Of Income Taxes Advertisements In Banyuwangi District )*
- Arditia, Reza. (2012). *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.* Jurusan Akuntansi: Universitas Negeri Surabaya
- Candrasih, A. (2016). Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota surabaya
- Hendra. (2011). *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya*
- Husaini, M. (2013) *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*
- Indriani, N. (2010). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak HotelDan Restoran Terhadap PendapatanAsli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009*
- Kobandaha, Rezlyanti. (2016). *Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu.*Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi
- Latief, Nazaruddin Imam. (2010) *Kontribusi Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan (PAD) Di Kabupaten Kutau Timur.* Fakultas Ekonomi. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Maulana, Syahir A. (2013). *Analisi Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.* Jurusan Akuntansi: Universitas Hasanuddin Makassar
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan* Edisi Terbaru 2016: Penerbit Andi.
- Pawiloi, Mahyudin . (2014). *Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.* Jurusan Akuntansi: Universitas Hasanuddin Makassar

- Pratiwi, Heratity. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Jurusan Akuntansi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rahayuningsih. (2009). Analisis efektivitas pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di banyuwangi
- Rompis, (2015). Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara ( Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi )
- Ruswandi, R.(2009). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jurnal Akuntansi
- Syahfitri,L. (2011). Analisis peranan dan kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota jambi
- Wangkar, Anneke. (2015). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Widyaningsih, A. (2007). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001 - 2007 ( *Analysis Potential of Advertisement Tax Income in Bandung* )
- Winarso, W. (2015). Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Pada Kantor Cp Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II ).

Kegiatan	Jadwal Penelitian																							
	April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi																								
Usulan Judul																								
Penyusunan Proposal & Bimbingan																								
Ujian Proposal																								
Revisi Proposal																								
Pengolahan Data & Bimbingan																								
Ujian Skripsi																								
Revisi Skripsi																								

Kegiatan	2022																							
	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi																								
Usulan Judul																								
Penyusunan Proposal & Bimbingan																								
Ujian Proposal																								
Revisi Proposal																								
Pengolahan Data & Bimbingan																								
Ujian Skripsi																								
Revisi Skripsi																								

## **ABSTRACT**

**PANDI PAKUTE. E1119117. THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX AND RESTAURANT TAX ON THE INCREASE OF REGIONAL REVENUE OF POHuwato REGENCY**

*Costs as a source of regional revenues are used to finance government expenditures, for example, spending for government organizations, building and repairing foundations, establishing schools and welfare offices, giving subsidies for the police, and financing government activities. This study aims to find out: (1) the effectiveness of the hotel tax and restaurant tax on the increase of regional revenue and (2) the contribution of hotel tax and restaurant tax to the increase of regional revenue. By involving 45 respondents, this study employs multiple regression analysis methods. The results of the first hypothesis indicate that the Contribution (X1) and Regional Revenue have a t count of 0.940 > sig. of 0.048. It means that  $H_0$  is rejected. Though so,  $H_a$  is accepted or significant. The Effectiveness (X2) and Regional Revenue result in a t count of 0.931 > sig. of 0.030. It means that  $H_0$  is rejected. However,  $H_a$  is accepted or significant.*

**Keywords:** contribution, effectiveness, regional revenue



## ABSTRAK

### **PANDI PAKUTE. E1119117. KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS ADANYA PAJAK HOTEL DAN PAJAK RUMAH MAKAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POHuwATO**

Biaya sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, misalnya. pembiayaan organisasi pemerintah, pembangunan dan perbaikan yayasan, pengaturan sekolah dan kantor kesejahteraan, subsidi untuk polisi, dan pembiayaan untuk kegiatan pemerintah. (1) Untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (2) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak rumah makan berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan responden sebanyak 45 responden, Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil hipotesis pertama Kontribusi (X1) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana  $t$  hitung  $0,940 > \text{sig.}$  sebesar 0,048artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan. Efektivitas (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah dimana  $t$  hitung  $0,931 > \text{sig.}$  sebesar 0,030 berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau signifikan.

Kata kunci: kontribusi, efektivitas, Pendapatan Asli Daerah



### **Kuesioner**

#### **A. Biodata Responden**

**Nama** : \_\_\_\_\_

**Alamat** : \_\_\_\_\_

**Jenis Kelamin** : \_\_\_\_\_

#### **B. Pilih jawaban yang anda anggap paling benar dengan alternatif :**

**a. Sangat setuju**

**b. Setuju**

**c. Ragu-ragu**

**d. Kurang setuju**

**e. Tidak setuju**

#### **C. Variabel Kontribusi Pajak Hotel dan rumah makan (X1)**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>				
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>RR</b>	<b>KS</b>	<b>TS</b>
a.	kontribusi wajib pajak hotel dan rumah makan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan.					
b.	Bagaimana investasi kontribusi wajib pajak dilakukan secara jelas.					
c.	kontribusi wajib pajak menghitung jumlah pajak dengan seksama.					
d.	Peringatan ataupun ancaman dan penerapan administrasi.					
e.	Kontribusi wajib Pajak sangat membantu dalam peningkatan PAD					

**D. Variabel Efektivitas Pajak Hotel dan rumah makan (X2)**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
a.	Apakah sudah efektif penerimaan pajak hotel dan rumah makan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan.					
b.	Apakah sudah efektif investasi wajib pajak.					
c.	Sudah efektif perhitungan wajib pajak					
d.	Apakah Peringatan ataupun ancaman dan penerapan administrasi sudah efektif.					
e.	sangat membantu dalam peningkatan PAD					

**E. Variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y)**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RR	KS	TS
a.	Iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
b.	Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.					
c.	Penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah.					

d.	Penerimaan pajak hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan daerah.					
----	---	--	--	--	--	--

**TABULASI DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL X1  
(KONTRIBUSI)**

NO	ITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN					TOTAL	RATA-RATA
	1	2	3	4	5		
1	3	5	4	3	4	19	3.8
2	4	4	4	3	4	19	3.8
3	3	5	4	3	4	19	3.8
4	4	4	4	3	5	20	4
5	3	5	4	3	4	19	3.8
6	4	5	5	3	4	21	4.2
7	4	4	5	3	5	21	4.2
8	4	4	5	3	3	19	3.8
9	4	4	5	3	4	20	4
10	4	5	4	4	4	21	4.2
11	4	4	4	3	5	20	4
12	4	4	4	3	3	18	3.6
13	4	5	4	3	5	21	4.2
14	4	5	4	3	4	20	4
15	4	4	4	3	3	18	3.6
16	4	4	3	3	4	18	3.6
17	5	3	5	4	5	22	4.4
18	4	4	4	4	4	20	4
19	5	3	4	5	5	22	4.4
20	4	4	4	4	3	19	3.8
21	5	3	5	4	5	22	4.4
22	4	4	5	5	4	22	4.4
23	5	4	4	4	5	22	4.4
24	4	4	4	4	3	19	3.8
25	5	3	4	4	5	21	4.2
26	4	3	4	4	5	20	4
27	5	3	5	3	3	19	3.8
28	4	3	5	4	4	20	4
29	4	3	4	4	4	19	3.8
30	5	3	3	3	4	18	3.6
31	4	5	3	3	4	19	3.8
32	4	5	4	3	4	20	4
33	4	5	4	4	4	21	4.2
34	5	4	3	3	5	20	4

35	5	5	4	4	4	22	4.4
36	4	5	5	3	4	21	4.2
37	3	4	3	4	5	19	3.8
38	4	5	5	4	3	21	4.2
39	4	5	5	4	4	22	4.4
40	3	5	3	4	5	20	4
41	4	5	4	4	5	22	4.4
42	3	4	4	3	3	17	3.4
43	5	5	3	3	5	21	4.2
44	5	5	4	3	4	21	4.2
45	4	5	4	4	3	20	4

**TABULASI DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL X2  
(EFEKTIFITAS)**

NO	ITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN					TOTAL	RATA-RATA
	1	2	3	4	5		
1	3	4	4	4	5	20	4
2	3	5	4	4	3	19	3.8
3	3	4	4	4	3	18	3.6
4	5	4	5	4	4	22	4.4
5	5	5	4	4	4	22	4.4
6	4	4	4	4	3	19	3.8
7	3	4	5	5	4	21	4.2
8	4	5	5	3	3	20	4
9	3	4	4	3	3	17	3.4
10	3	4	5	5	5	22	4.4
11	3	5	4	4	3	19	3.8
12	3	4	5	3	3	18	3.6
13	3	4	4	4	4	19	3.8
14	5	4	4	5	3	21	4.2
15	3	4	4	4	3	18	3.6
16	3	4	3	4	4	18	3.6
17	5	4	5	4	3	21	4.2
18	3	4	3	4	3	17	3.4
19	3	4	3	5	3	18	3.6
20	3	5	4	4	4	20	4
21	3	4	5	4	3	19	3.8
22	4	5	3	4	4	20	4
23	4	3	3	5	3	18	3.6
24	5	4	3	4	3	19	3.8
25	4	3	3	4	4	18	3.6
26	5	4	4	4	4	21	4.2
27	3	3	5	5	3	19	3.8
28	4	3	5	4	5	21	4.2
29	4	3	4	5	3	19	3.8
30	5	3	3	4	5	20	4
31	3	4	4	4	5	20	4
32	3	5	4	4	3	19	3.8
33	3	4	4	4	3	18	3.6
34	5	4	5	4	4	22	4.4

35	5	5	4	4	4	22	4.4
36	4	4	4	4	3	19	3.8
37	3	4	5	5	4	21	4.2
38	4	5	5	3	3	20	4
39	3	4	4	3	3	17	3.4
40	3	4	5	5	5	22	4.4
41	3	5	4	4	3	19	3.8
42	3	4	5	3	3	18	3.6
43	3	4	4	4	4	19	3.8
44	5	4	4	5	3	21	4.2
45	3	4	4	4	3	18	3.6

## TABULASI DATA HASIL PENELITIAN VARIABEL Y (PENINGKATAN PAD)

NO	ITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN				TOTAL	RATA-RATA
	1	2	3	4		
1	3	4	4	4	15	3.75
2	3	5	4	4	16	4
3	3	4	4	4	15	3.75
4	5	4	5	3	17	4.25
5	5	5	4	4	18	4.5
6	4	4	4	4	16	4
7	3	4	5	4	16	4
8	4	5	5	4	18	4.5
9	3	4	4	4	15	3.75
10	3	4	5	4	16	4
11	3	5	4	4	16	4
12	3	4	5	3	15	3.75
13	3	4	4	3	14	3.5
14	5	4	4	3	16	4
15	3	4	4	4	15	3.75
16	3	4	3	3	13	3.25
17	5	4	5	4	18	4.5
18	3	4	3	4	14	3.5
19	3	4	3	4	14	3.5
20	3	5	4	4	16	4
21	3	4	5	4	16	4
22	4	5	3	4	16	4
23	4	3	3	4	14	3.5
24	5	4	3	4	16	4
25	4	3	3	4	14	3.5
26	5	4	4	4	17	4.25
27	3	3	5	3	14	3.5
28	43	3	5	4	55	13.75
29	4	3	4	4	15	3.75
30	5	3	3	3	14	3.5
31	3	4	4	4	15	3.75
32	3	5	4	4	16	4
33	3	4	4	4	15	3.75
34	5	4	5	3	17	4.25

35	5	5	4	4	18	4.5
36	4	4	4	4	16	4
37	3	4	5	4	16	4
38	4	5	5	4	18	4.5
39	3	4	4	4	15	3.75
40	3	4	5	4	16	4
41	3	5	4	4	16	4
42	3	4	5	3	15	3.75
43	3	4	4	3	14	3.5
44	5	4	4	3	16	4
45	3	4	4	4	15	3.75

FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5  
 /ORDER=ANALYSIS.

## Frequencies

[DataSet0]

### Statistics

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
N	Valid	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0

## Frequency Table

### X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	13.3	13.3
	4.00	28	62.2	75.6
	5.00	11	24.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0

### X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	9	20.0	20.0
	4.00	17	37.8	57.8
	5.00	19	42.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0

### X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	15.6	15.6
	4.00	26	57.8	57.8
	5.00	12	26.7	26.7
	Total	45	100.0	100.0

### X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	24	53.3	53.3
	4.00	19	42.2	95.6

5.00	2	4.4	4.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	9	20.0	20.0	20.0
	4.00	21	46.7	46.7	66.7
	5.00	15	33.3	33.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5  
/ORDER=ANALYSIS.

### Frequencies

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
N	Valid	45	45	45	45	45
	Missing	0	0	0	0	0

### Frequency Table

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	26	57.8	57.8	57.8
	4.00	9	20.0	20.0	77.8
	5.00	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	6	13.3	13.3	13.3
	4.00	29	64.4	64.4	77.8
	5.00	10	22.2	22.2	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	17.8	17.8	17.8
	4.00	23	51.1	51.1	68.9

5.00	14	31.1	31.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	13.3	13.3	13.3
4.00	29	64.4	64.4	77.8
5.00	10	22.2	22.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	26	57.8	57.8	57.8
4.00	13	28.9	28.9	86.7
5.00	6	13.3	13.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

FREQUENCIES VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4  
 /ORDER=ANALYSIS.

### Frequencies

#### Statistics

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
N				
Valid	45	45	45	45
Missing	0	0	0	0

### Frequency Table

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	26	57.8	57.8	57.8
4.00	9	20.0	20.0	77.8
5.00	10	22.2	22.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	6	13.3	13.3	13.3
4.00	29	64.4	64.4	77.8

5.00	10	22.2	22.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	8	17.8	17.8	17.8
4.00	23	51.1	51.1	68.9
5.00	14	31.1	31.1	100.0
Total	45	100.0	100.0	

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	11	24.4	24.4	24.4
4.00	34	75.6	75.6	100.0
Total	45	100.0	100.0	

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/RESIDUALS DURBIN.

```

## Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	4.1222	1.50059	45
X1	4.0178	.26568	45
X2	3.9022	.30037	45

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.029	.287
	X1	.029	1.000	.079
	X2	.287	.079	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.426	.028
	X1	.426	.	.302
	X2	.028	.302	.
N	Y	45	45	45
	X1	45	45	45
	X2	45	45	45

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.287 <sup>a</sup>	.082	.039	1.47135	.082	1.883	2	42	.065	2.120

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.153	2	4.076	.883	.045 <sup>b</sup>
	Residual	90.925	42	2.165		
	Total	99.078	44			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.594	4.265		.374	.071
	X1	.534	.438	.006	.940	.048
	X2	.456	.741	.286	.931	.030

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.994	1.000	.00	.00	.00
	2	.005	25.285	.01	.37	.71
	3	.002	41.496	.99	.63	.29

a. Dependent Variable: Y

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.4032	4.8471	4.1222	.43045	45
Residual	-.84037	9.20243	.00000	1.43752	45
Std. Predicted Value	-1.670	1.684	.000	1.000	45
Std. Residual	-.571	6.254	.000	.977	45

a. Dependent Variable: Y

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

---

Nomor : 19224/PIP/LEMLIT-UNISAN/IV/2022  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada YTH.**  
**Kepala Kesbangpol Kab. Pohuwato**  
**Di**  
**Tempat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

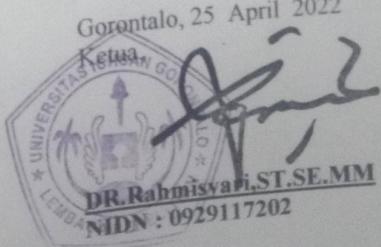
Nama	:	DR.Rahmisyari,ST,SE,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

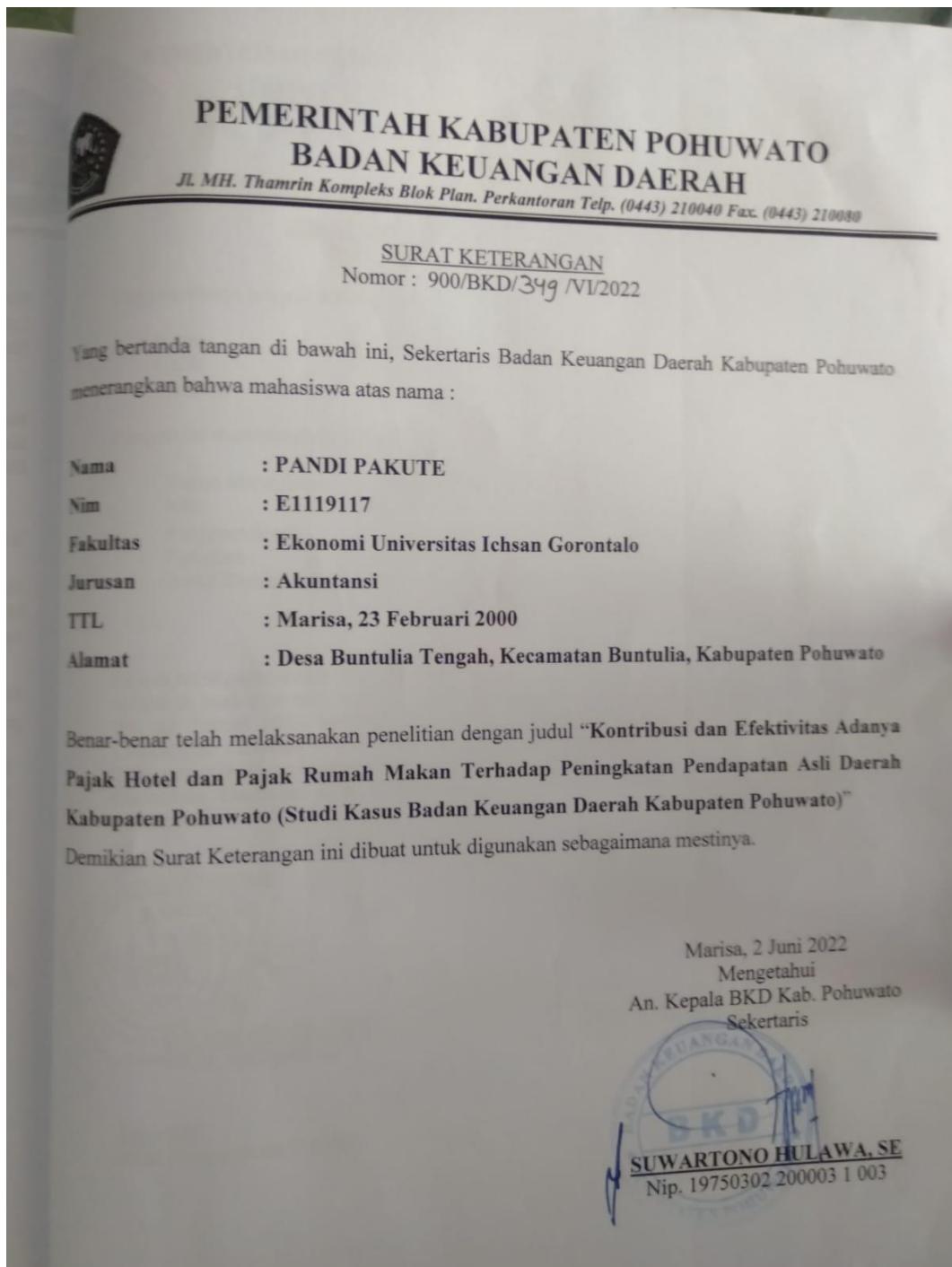
Nama Mahasiswa	:	Pandi Pakute
NIM	:	E1119117
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato
Judul penelitian	:	Kontribusi Dan Efektivitas Adanya Pajak Hotel Dan Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato

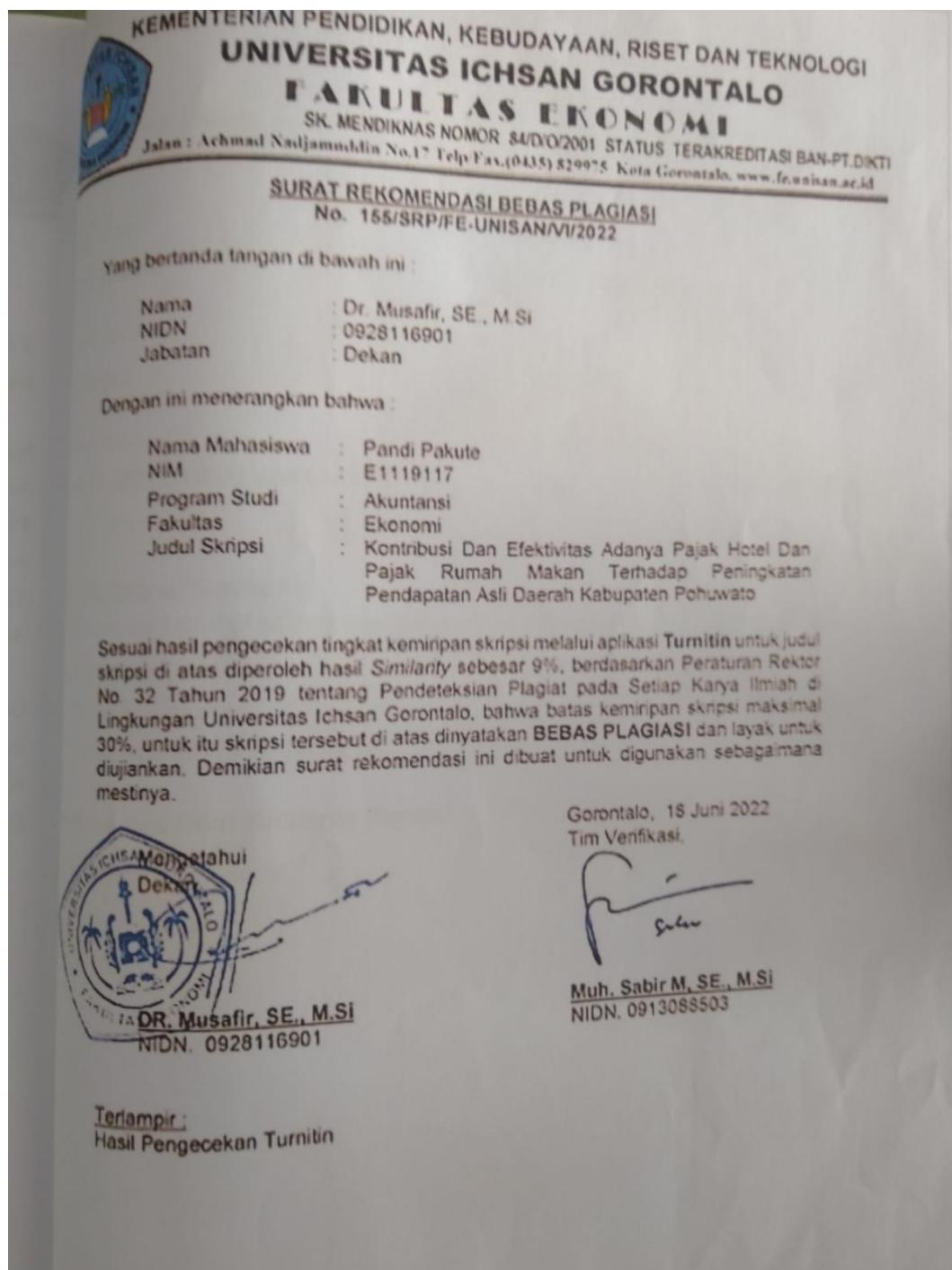
Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 25 April 2022



Ketua  
 DR. Rahmisyari, ST, SE, MM  
 NIDN : 0929117202





turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18599

UPPER NAME  
skripsi Pandi Pakute.docx

AUTHOR  
PANDI PAKUTE

WORD COUNT  
3614 Words

CHARACTER COUNT  
54754 Characters

PAGE COUNT  
53 Pages

FILE SIZE  
113.7KB

SUBMISSION DATE  
Jun 11, 2022 10:02 AM GMT+8

REPORT DATE  
Jun 11, 2022 10:05 AM GMT+8

**9% Overall Similarity**  
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

**Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Similarity Report ID: oid:25211:18599735		
1	repository.unhas.ac.id	<1 %
Internet		
10	de.scribd.com	<1 %
Internet		
11	digilib.uinsgd.ac.id	<1 %
Internet		
12	jurnal.unigo.ac.id	<1 %
Internet		

*CURRICULUM VITAE***1. Identitas Pribadi**

Nama : **PANDI PAKUTE**  
NIM : E1119117  
Tempat/Tgl Lahir : Marisa, 23 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Angkatan : 2019  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Agama : Islam  
Alamat : Buntulia Tengah, Kec. Buntulia  
Kab. Pohuwato

**2. Riwayat Pendidikan**

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 07 Buntulia Tengah pada tahun 2012
2. Kemudian Melanjutkan Ke Jenjang Selanjutnya Yakni di SMP Negeri 02 Buntulia Satap dan Lulus Pada tahun 2015
3. Kemudian Melanjutkan Ke Benjang Berikutnya yakni di SMA Negeri 1 Buntulia dan Lulus pada Tahun 2018
4. Dan Kemudian Melanjutkan ke Jenjang Berikutnya Yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato (STIE Ichsan Pohuwato) dengan Jurusan Akuntansi Kemudian Pada tahun 2019 di konversi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Alhamdulillah pada tahun 2022 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsaan Gorontalo